

BAB III

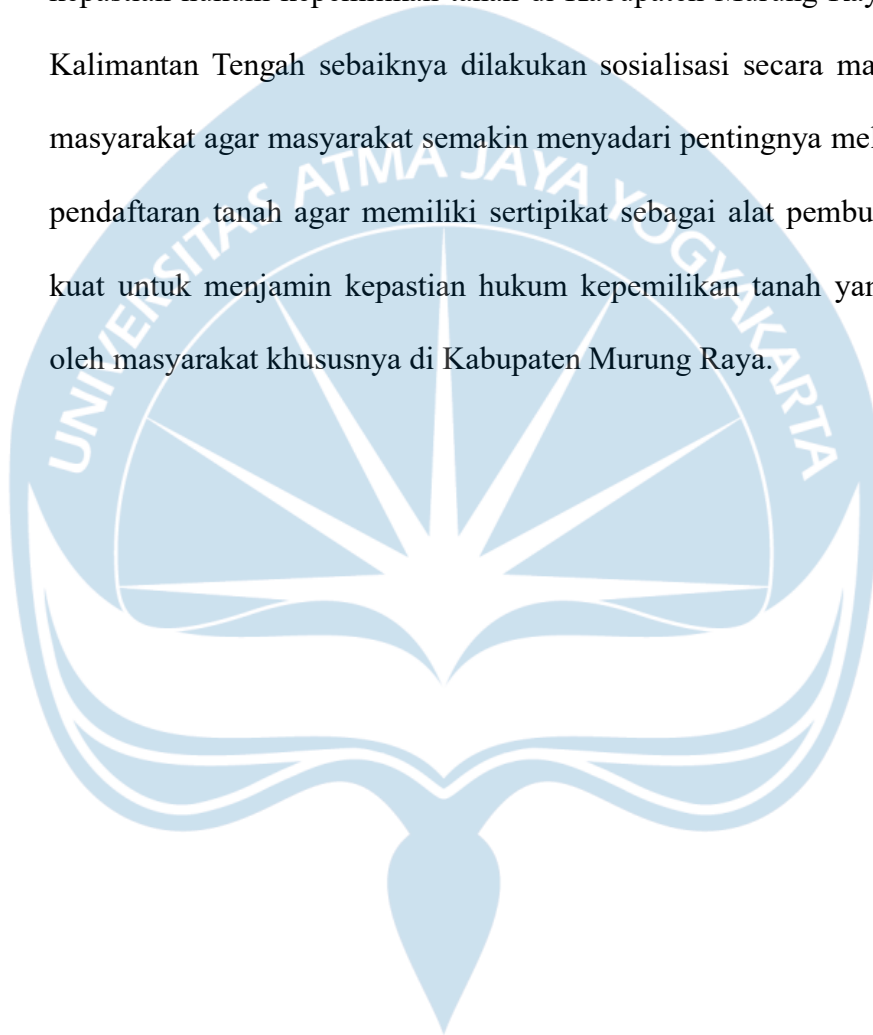
PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan perubahan sertipikat hak milik atas tanah konvensional menjadi sertipikat tanah berbasis elektronik terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan perintah Pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil penelitian, sertipikat elektronik meningkatkan efisiensi layanan pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan keamanan arsip pertanahan untuk meminimalisir terjadinya peretasan (*hacker*), kehilangan, kerusakan dan pemalsuan sertipikat elektronik serta sertipikat elektronik dapat di back up jika diperlukan karena arsip-arsip sertipikat tanah berbasis elektronik tersebut tersimpan di blok data yang sudah dilakukan dengan model *encryption* dan di back up secara teratur di dalam *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* Kementerian ATR/BPN.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya, dalam hal pelaksanaan perubahan sertipikat hak milik atas tanah konvensional menjadi sertipikat tanah berbasis elektronik terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar masyarakat semakin menyadari pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah agar memiliki sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Murung Raya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adrian Sutedi., 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan., 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP No. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono., 2020, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Effendi Perangin., 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan., 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis., 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady., 2023, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sahnan., 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Sudikno Mertokusumo., 1998, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto., 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso., 2009, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- ., 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- ., 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Skripsi:

- Mishbahul Munir, 2023, *Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Tanda Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syariah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nadya Rizki Nasution, 2023, *Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria*

Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Thalia Jesia Putri, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik (E-CERTIFICATE)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461. Jakarta.

Lampiran 1. Surat Ijin Riset/ Penelitian ke Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 269/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

24 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya
Jalan Diponegoro Puruk Cahu

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Irene Nasthasya Sitompul
2. Nomor Mahasiswa : 210514081
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Konvensional Menjadi Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Murung Raya
7. No. Handphone / WA : 081254224657

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2. Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Pangeran Diponegoro Puruk Cahu, Telepon : (0528) 31844, email : suratbpmura@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 391/SKet-62.12.100.2.UP.02.03/XI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMIHAR SITOMPUL, S.E.
NIP : 197103172014081002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Murung Raya

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Program Kekhususan PK 3 (Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan hukum Adat) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

Nama : IRENE NASTHASYA SITOMPUL
NPM : 210514081
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian mulai 24 Oktober s/d 12 November 2024, guna Penyusunan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perubahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Konvensional Menjadi Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Murung Raya".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 18 November 2024
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Murung Raya
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditanda tangani secara
elektronik

Sumihar Sitompul, S.E..
NIP. 197103172014081002

Tembusan :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayu, Profesional, Terpercaya

V.1.05

Gambar 2. Foto bersama Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.



Gambar 3. Wawancara dengan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.



Gambar 4. Narasumber menunjukkan bentuk sertipikat konvensional dan sertipikat elektronik.

